

## **PENGARUH MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP MUTU SEKOLAH**

**Rabukit Damanik**

Dosen STKIP Budi Daya Binjai

### **Abstrak**

Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh manajemen berbasis sekolah terhadap mutu sekolah; (2) pengaruh komite sekolah terhadap mutu sekolah; dan (3) pengaruh manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah terhadap mutu sekolah. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasional dengan metode path analisis (analisa jalur). Populasi penelitian ini adalah guru SD Negeri Kecamatan Patumbak sebanyak 290 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaruh manajemen berbasis sekolah (X1) terhadap mutu sekolah (Y) sebesar  $0,611 = 61,1\%$ , hal ini terlihat pada nilai Sig.  $0,00 (0,00 < 0,05)$ ; (2) Pengaruh komite sekolah (X2) terhadap mutu sekolah (Y) sebesar  $0,389 = 38,9\%$ , hal ini terlihat pada nilai Sig.  $0,00 (0,00 < 0,05)$ ; (3) Pengaruh pengaruh manajemen berbasis sekolah (X1) dan pengaruh komite sekolah (X2) terhadap mutu sekolah (Y) sebesar  $0,772 = 77,2$ .

**Kata Kunci : Manajemen Berbasis Sekolah, Komite Sekolah, dan Mutu Sekolah**

### **A. Pendahuluan**

Mutu pendidikan adalah masalah yang sejak dulu senantiasa diupayakan peningkatannya oleh pemerintah. Pengendalian mutu pendidikan pada dasarnya adalah pengendalian mutu sumber daya manusia yang berada dalam sistem tersebut. Untuk mengetahui pengendalian ini dibutuhkan informasi mengenai keadaan peserta didik, apakah ada perubahan, apakah guru berfungsi, apakah sekolah mendukung terlaksananya program-program pendidikan sehingga hasilnya bisa dicapai secara optimal.

Dalam rencana strategi pendidikan nasional salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan berkaitan dengan mutu pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan untuk dapat mengendalikan mutu dalam pendidikan adalah dengan melakukan assessment (penilaian). Proses penilaian dalam pembelajaran dilakukan untuk memperoleh data mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi instrument penjamin mutu, pengendalian mutu dan perbaikan mutu dalam sistem pendidikan baik secara kelas maupun

sekolah. Dalam kurikulum 2013 penilaian yang dilakukan mengacu pada Permendikbud No 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan (Mulyasa, 2013). Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik (*Authentic Assessment*), yang sebenarnya sudah ada dalam kurikulum KTSP namun dalam implementasinya belum berjalan secara optimal

Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, Indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang mencakup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Sekolah kurang menjamin masa depan anak yang lebih baik. Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang-barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup Input, proses dan output pendidikan (Depdiknas Buku 1 MPMBS, 2001:25).

Mutu sekolah adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan oleh sekolah (Jerome, 2007 : 75). Mutu sekolah adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan. Sebab baik tidaknya lulusan sekolah sangat ditentukan oleh mutu sekolah tersebut yang pada akhirnya menjadi acuan tinggi rendahnya mutu pendidikan. Mutu juga berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standart atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan, standard ini menurut Depdiknas (2001:2) dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang bersifat kualitatif khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan pada rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran dan tenaga kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mutu sekolah dipengaruhi oleh peran : 1) Masyarakat, 2) Siswa, 3) Orangtua, 4) Guru, 5) Staf, 6) Administrator/ Kepala Sekolah, 7) Manajemen, 8) Pengawas Sekolah, 9) Dewan Sekolah (Jerome, S. Arcaro, 2007 : 17). Berdasarkan teori diatas jelaslah bahwa Manajemen yang dalam hal ini penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah yang dalam hal ini Komite Sekolah memiliki hubungan langsung dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan

manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Menurut Mulyasa, 2004 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan Nanang Fatah (2000) menyatakan Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal *Local Stakeholder*.

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang semakin meningkat dewasa ini, maka dalam era manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pengelolaan pendidikan perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/ industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota

dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Dengan demikian pelaksanaan MBS disatuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor lain yang berhubungan dengan mutu sekolah adalah komite sekolah. Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/ industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu komite sekolah. Menurut Fatah (2003 : 118) komite sekolah adalah suatu badan atau lembaga non politis dan non profit (tidak mengambil keuntungan), dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan sekolah sebagai representasi berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah. Secara jelas fungsi komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan.

Sedangkan Anonimus, 2004 Pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk (a) mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program-program pendidikan di satuan pendidikan, (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan kenyataan diatas jelaslah bahwa komite sekolah mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas (mutu) pendidikan di sekolah. Ini berarti semakin tinggi peran komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah, semakin tinggi pula peningkatan mutu sekolah tersebut. Demikian juga sebaliknya semakin rendah peran

komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, semakin rendah pula mutu pendidikan di sekolah. Lebih jelaslah yang lagi bahwa komite sekolah memiliki hubungan langsung terhadap peningkatan mutu sekolah.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di SD Negeri Kecamatan Patumbak, manajemen yang diterapkan oleh kepala sekolah kurang baik. Ini terbukti dari hasil kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil kinerja tidaklah memuaskan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga dengan peran komite sekolah. Disamping itu dari hasil observasi yang dilakukan komite sekolah kurang memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini terlihat dalam rapat-rapat komite bahwa peserta rapat cenderung diam dan tidak memiliki ide atau gagasan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Sehingga pada akhirnya mutu lulusan SD Negeri Kecamatan Patumbak juga sangatlah rendah.

Guna perbaikan kualitas pembelajaran yang terjadi pada pendidikan dasar dan menengah perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk perlu adanya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat sekitar. Berkaitan dengan hubungan antara sekolah dan masyarakat yang belum berjalan dengan baik, perlu adanya suatu lembaga khusus dari masyarakat untuk ikut memberikan perhatian perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah secara penuh. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat secara bersama. Masyarakat merupakan stakeholder yang mempunyai kepentingan atas keberhasilan pendidikan di sekolah (baik pendidikan dasar maupun menengah). Untuk mempermudah hubungan antara sekolah dan masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mampu menjadi penghubung, yaitu dewan pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi, dan komite sekolah untuk tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan badan atau lembaga non profit dan non politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis oleh *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan

kualitas, proses dan hasil pendidikan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis menganggap penting membuat penelitian dengan judul "Pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah dan Komite Sekolah Terhadap Mutu Sekolah di SD Negeri Kecamatan Patumbak".

## **B. Kajian Teoritik**

### **1. Mutu Sekolah**

Menurut Jerome. S. Arcano (2007:75) mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan, standar ini menurut Depdiknas (2001:2) dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan pada rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran dan tenaga kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandaskan luas, nyata dan bermakna. Dalam kaitan dengan strategi yang akan ditempuh, peningkatan mutu pendidikan sangat terkait dengan relevansi pendidikan dan penilaian berdasarkan kondisi aktual mutu pendidikan tersebut. Telaah terhadap situasi aktual merupakan titik berangkat dalam menempuh perjalanan ke situasi ideal yang didahului oleh suatu batas ambang sebagai landasan minimal, dan mencakup mutu pendidikan yang

dipertanggungjawabkan serta yang ditandai oleh suatu tolok ukur sebagai norma ideal.

Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Bertitik tolak pada kecenderungan ini penilaian masyarakat tentang mutu lulusan sekolah pun terus menerus berkembang. Karena itu sekolah harus terus menerus meningkatkan mutu lulusannya dengan menyesuainya dengan perkembangan tuntutan masyarakat menuju pada mutu pendidikan yang dilandasi tolok ukur norma ideal.

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan. Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : (1) prestasi akademik yaitu nilai rapor dan nilai kelulusan memenuhi standar yang ditentukan; (2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya; dan (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterimanya di sekolah.

Memenuhi harapan mutu pendidikan yang tinggi tentu diperlukan desentralisasi terhadap fungsi-tungsi manajemen disekolah untuk mengoptimalkan kebijakan pada tingkat manajemen sekolah dalam melaksanakan programnya. Desentralisasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen ini memberi kewenangan kepada kepala sekolah bersama seluruh personal sekolah untuk menentukan visi dan misi, menyusun perencanaan sekolah, membagi tugas kepada seluruh personal, memimpin penyelenggaraan program sekolah, melakukan pengawasan dan perbaikan sesuai dengan keperluan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa peranan antara para profesional, orang tua, dan masyarakat saling melengkapi memenuhi tuntutan kualitas sekolah.

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan yaitu: a) Hasil akhir pendidikan; b) Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap; c) Proses pendidikan; d) Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa); dan e) *Raw input* dan lingkungan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain), dapat pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga atau seni. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang *intangibile* seperti suasana disiplin. Keakraban, saling menghormati dan sebagainya.

Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input. Seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

## **2. Manajemen Berbasis Sekolah**

Menurut Sagala (2004:133) Manajemen Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi atau kemandirian yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah dan masyarakat sesuai dengan standar mutu yang berkaitan dengan program sekolah.

Selain itu, Manullang dan Milfayetty (2001:1) mengemukakan Manajemen Berbasis Sekolah merupakan konsep pengelolaan sekolah dengan ciri otonomi yang mengubah ketergantungan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengkoordinasian dan penyesuaian sumber daya yang dilakukan oleh sekolah secara mandiri dengan melibatkan semua kelompok yang berkepentingan. Dalam kajian ini Manajemen Berbasis Sekolah dibatasi sebagai model manajemen sekolah yang ditandai oleh adanya otonomi yang luas di sekolah, peran serta dan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya, efektivitas keberhasilan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah adalah ukuran yang menyatakan capaian tujuan/*output/target* dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.

Menurut Mulyasa (2004:25) Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk : (1) meningkatkan efisiensi, (2) mutu dan (3) pemerataan pendidikan. Depdiknas (2007:16) menyatakan Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik, yaitu partisipasi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat dan rendahnya intervensi pemerintah daerah terhadap sekolah (Sagala, 2004:133).

Secara lebih rinci menurut Depdiknas (2007.b:4) Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk (1) memberdayakan sumber daya yang tersedia, (2) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengambil keputusan bersama, (3) meningkatkan tanggung sekolah terhadap orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam hal mutu pendidikan. (4) meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah, dan (5) meningkatkan efisiensi, relevansi dan pemerataan pendidikan.

Menurut Sagala (2004:133-134) lebih spesifik lagi, Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan (1) menjamin mutu pembelajaran siswa yang berpijak pada azas pelayanan dan prestasi hasil belajar, (2) meningkatkan kualitas transfer ilmu pengetahuan dan membangun karakter bangsa yang berbudaya, (3) meningkatkan mutu sekolah dengan memantapkan pemberdayaan melalui kemandirian, kreativitas, inisiatif, dan inovatif dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya sekolah, (4) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan dengan mengakomodir aspirasi bersama, (5) meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah, dan (6) meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai, kebijakan pengelolaan sekolah oleh semua unsur yang terkait dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Mulyasa (2004:25-26) mengemukakan manfaat manajemen berbasis sekolah adalah (1) memberikan keleluasaan dan kewenangan yang besar kepada sekolah disertai dengan seperangkat tanggung jawab yang besar, (2) mendorong profesionalisme guru dan Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah, dan (3) menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, sehingga menjamin partisipasi yang lebih luas dalam perumusan keputusan tentang pendidikan.

Menurut Depdiknas (2006:4) Manajemen Berbasis Sekolah diterapkan agar: (1) sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, (2) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya, (3) penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat, (4) keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan

sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, (5) Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan, (6) sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua siswa, masyarakat dan pemerintah daerah setempat, (7) sekolah dapat secara tepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat, dan (8) secara yuridis Manajemen Berbasis Sekolah telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Levin dan Lockhead yang dikutip Umaedi (2002:4) menuliskan beberapa indikator sekolah efektif, yakni (1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (2) perumusan visi, misi dan target mutu yang jelas, (3) kepemimpinan sekolah yang kuat, (4) harapan prestasi yang tinggi, (5) pengembangan staf sekolah secara terus menerus, (6) evaluasi belajar untuk penyempurnaan proses belajar mengajar, dan (7) komunikasi dan dukungan orangtua dan masyarakat.

Sejalan itu, Hatton dan Smith (1992:5) mengemukakan indikator sekolah efektif adalah (1) kepemimpinan instruksional yang kuat, (2) relevansi yang jelas bagi lulusan, (3) harapan yang tinggi dari siswa-siswanya, (4) lingkungan yang kondusif, dan (5) pengawasan yang ketat terhadap tingkat pencapaian belajar. Sementara itu, Newman, yang dikutip Moedjiarto (2002:4-5) menegaskan indikator sekolah efektif adalah kemampuan siswa pada setiap mata pelajaran dengan penekanan khusus pada peningkatan hasil belajar bagi siswa yang tergolong lambat. Sedangkan, Hadiyanto (2004:69) mengemukakan karakteristik sekolah efektif adalah (1) memiliki kepemimpinan administratif yang kuat, hal itu ditunjukkan perhatian pada kualitas pembelajaran, (2) mempunyai iklim harapan dimana tidak ada satupun siswa yang gagal pada prestasi minimum, (3) suasana sekolah teratur dan tidak

kaku, tenang tanpa adanya tekanan, dan pada umumnya kondusif untuk urusan pembelajaran, (4) sekolah memiliki fokus pembelajaran yang dipahami secara luas dan mendalam, dan (5) sering memonitor kemajuan siswanya.

### 3. Komite Sekolah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 merinci Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dengan anggota orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Selanjutnya pada pasal 56 ayat 3 menyebutkan Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta , pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Selain itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 044/U/2002 dalam Depdiknas (2003: 263), dinyatakan Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan dimensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah, Sedangkan menurut Fattah (2003:118) Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di sekolah sebagai representasi dan berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Menurut suryadi (2003: 4) penyederhanaan konsep “masyarakat” melalui “perwakilan” fungsi *stakeholder* dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap sekolah yang sedapat mungkin dapat mempresentasikan keberagaman agar benar-benar dapat mewakili masyarakat, sehingga interaksi antara sekolah dengan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan Komite Sekolah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 441/2002, prinsip yang dianut dalam pembentukan Komite Sekolah adalah (1) transparan, akuntabel dan demokratis; dan (2) merupakan mitra sekolah.

Menurut Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (2003:16) pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk : (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di sekolah. (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Menurut Fattah (2003:118) tujuan Komite Sekolah adalah (1) mewadahi dan meningkatkan partisipasi pada stakeholder pendidikan di tingkat sekolah untuk turut serta dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas siswa secara proporsional dan terbuka, (2) mewadahi partisipasi para *stakeholder* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya berkenaan dengan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional, mewadahi partisipasi, baik individu maupun kelompok sukarela (*volountir*) pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan sekolah, dan (4) menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di tingkat daerah.

Menurut Keputusan Menteri Nasional Nomor : 44/U/2002 dalam Depdiknas (2003.b:263-264) Komite Sekolah bertujuan untuk (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekoah.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *expost facto* yaitu variabel-variabel yang diteliti tidak dikendalikan dan dimanipulasi oleh peneliti, tetapi fakta diungkap berdasarkan pengukuran gejala yang telah dimiliki atau menguji apa yang akan terjadi. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD Negeri Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 364 Orang. sedangkan sampel berjumlah 290 orang.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa statistik dengan menggunakan bantuan komputer program *Excel dan SPSS 17*. Alasan yang mendasari dipakainya analisa statistik ini karena : (1) statistik bekerja dengan angka-angka; (2) statistik bekerja dengan objektif; dan (3) bersifat universal. Teknik analisa data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu uji *path analisis*.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan butir-butir pernyataan variabel manajemen berbasis sekolah ( $X_1$ ) yang berjumlah 20 butir, maka skor terendah adalah 47 dan yang tertinggi adalah 97. Rata-rata 71,98; simpangan baku 13,65; median 72; dan modus 71,17. Sebaran data ini menunjukkan bahwa skor rata-rata, median dan modus tidak jauh berbeda, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data cenderung berdistribusi normal. Sesuai dengan hasil perhitungan statistik dasar yang telah dilakukan, data diklasifikasikan dalam enam interval kelas. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang distribusi skor variabel manajemen berbasis sekolah ( $X_1$ ) dapat dilihat pada tabel serta histogram berikut.

**Tabel 4 : 1 Distribusi Frekuensi Skor Manajemen Berbasis Sekolah**

Interval	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
47 – 55	28	14.74	14.74
56 – 64	36	18.95	33.69
65 – 73	38	20	53.69
74 – 82	36	18.95	72.64
83 – 91	34	17.89	90.53
92 – 100	18	9.47	100
<b>Jumlah</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	

Dari tabel di atas menunjukkan sebaran skor manajemen berbasis sekolah ( $X_1$ ) sebanyak 64 orang (33,68 %) berada di bawah rata-rata kelas interval atau berkategori kurang; sebanyak 38 orang (20 %) berada pada rata-rata kelas interval atau berkategori cukup; dan sebanyak 88 orang (46,32 %) di atas rata-rata atau berkategori baik.

Berdasarkan butir-butir pernyataan variabel komite sekolah ( $X_2$ ) yang berjumlah 25 butir, maka skor terendah adalah 56 dan yang tertinggi adalah 107. Rata-rata 82,11; simpangan baku 13,82; median 82; dan modus 81,92. Sebaran data ini menunjukkan bahwa skor rata-rata, median dan modus tidak jauh berbeda, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data cenderung berdistribusi normal.

Sesuai dengan hasil perhitungan statistik dasar yang telah dilakukan, data diklasifikasikan dalam enam interval kelas. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang distribusi skor variabel komite sekolah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4 : 2 Distribusi Frekuensi Skor Komite Sekolah**

Interval	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
56 – 64	27	14.21	14.21
65 – 73	32	16.84	31.05
74 – 82	37	19.47	50.52
83 – 91	36	18.95	69.47
92 – 100	35	18.42	87.89
101 - 109	23	12.11	100
<b>Jumlah</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	

Tabel di atas menunjukkan sebaran skor komite sekolah ( $X_2$ ) sebanyak 96 orang (50,52 %) berada di bawah rata-rata kelas interval atau berkategori kurang; sebanyak 36 orang (18,95 %) berada pada rata-rata kelas interval atau berkategori cukup; dan sebanyak 58 orang (30,53 %) di atas rata-rata atau berkategori baik.

Berdasarkan butir-butir pernyataan variabel mutu sekolah ( $Y$ ) yang berjumlah 38 butir, maka skor terendah adalah 45 dan yang tertinggi adalah 95. Rata-rata 69,91; simpangan baku 13,63; median 70; dan modus 69,16. Sebaran data ini menunjukkan bahwa skor rata-rata, median dan modus tidak jauh berbeda, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data cenderung berdistribusi normal.

Sesuai dengan hasil perhitungan statistik dasar yang telah dilakukan, data diklasifikasikan dalam enam interval kelas. Untuk memperoleh

gambaran yang jelas tentang distribusi skor variabel mutu sekolah (Y) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4 : 3 Distribusi Frekuensi Skor Mutu Sekolah**

Interval	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
45 – 53	28	14.74	14.74
54 – 62	36	18.95	33.69
63 – 71	39	20.52	54.21
72 – 80	36	18.95	73.16
81 – 89	35	18.42	91.58
90 – 98	16	8.42	100
<b>Jumlah</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	

Tabel di atas menunjukkan sebaran skor mutu sekolah (Y) sebanyak 64 orang (33,69 %) berada di bawah rata-rata kelas interval atau berkategori kurang dan sebanyak 39 orang (20,52 %) berada pada rata-rata kelas interval atau berkategori sedang dan sebanyak 87 orang (45,79 %) di atas rata-rata atau berkategori baik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah yang diukur oleh mutu sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya mutu sekolah. Artinya tinggi rendahnya mutu sekolah dijelaskan oleh manajemen berbasis sekolah. Besarnya pengaruh manajemen berbasis sekolah terhadap mutu sekolah sebesar 0,611 (61,1%). Oleh karena itu untuk mengoptimalkan mutu sekolah harus diupayakan meningkatnya manajemen berbasis sekolah, sehingga pengetahuan tentang manajemen berbasis sekolah perlu ditingkatkan lagi bagi guru-guru maupun kepala sekolah. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input. Seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses itu

tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil *output* harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu tertentu. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil *output* yang ingin dicapai.

Temuan penelitian ini dikuatkan oleh Nanang Fatah : MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Sedangkan Depdiknas (2006: 2) menggambarkan MBS sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas, dan mendorong partisipasi langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu berdasarkan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa mutu sekolah kaitan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) : (1) akan memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti memperkuat relevansi, (2) memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan Kegiatan pendidikan, (3) memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan (4) memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah yang diukur oleh mutu sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya mutu sekolah. Artinya tinggi rendahnya mutu sekolah dijelaskan oleh komite sekolah. Besarnya pengaruh komite sekolah terhadap mutu sekolah sebesar 0,389 (38,9%). Oleh karena itu untuk mengoptimalkan mutu sekolah harus diupayakan meningkatnya komite sekolah. Menurut Fatah (2003 : 118) komite sekolah adalah suatu badan atau lembaga non politis dan non profit (tidak mengambil keuntungan), dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan sekolah sebagai representasi berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah.

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Secara jelas fungsi komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan.

Sedangkan Anonimus, 2004 Pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program-program pendidikan di satuan pendidikan, (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Komite Sekolah. Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah yang diukur oleh mutu sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya mutu sekolah. Artinya tinggi rendahnya mutu sekolah dijelaskan oleh manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah secara simultan. Besarnya pengaruh manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah secara simultan terhadap mutu sekolah sebesar 0,772 (77,2%). Oleh karena itu untuk mengoptimalkan mutu sekolah harus

diupayakan meningkatnya manajemen berbasis sekolah dan peran dari komite sekolah, sehingga pengetahuan tentang manajemen berbasis sekolah perlu ditingkatkan lagi bagi guru-guru maupun kepala sekolah. Pendidikan sekarang ini peran serta masyarakat menjadi sangat penting artinya bagi kehidupan suatu sekolah. Organisasi yang diharapkan mampu untuk menampung seluruh aspirasi dan peran serta masyarakat tersebut adalah Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan badan atau lembaga non profit dan non politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis oleh *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas, proses dan hasil pendidikan. Temuan penelitian ini dikuatkan oleh Jerome, S. Arcaro, 2007 Mutu sekolah dipengaruhi oleh peran : 1) Masyarakat, 2) Siswa, 3) Orangtua, 4) Guru, 5) Staf, 6) Administrator/ Kepala Sekolah, 7) Manajemen, 8) Pengawas Sekolah, 9) Dewan Sekolah.

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah berupa (a) pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (b) pendukung (*supporting agency*) baik yang berujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan, (c) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, (d) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Anonimus, 2003).

## **E. Penutup**

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaruh manajemen berbasis sekolah (X1) terhadap mutu sekolah (Y) secara langsung sebesar  $0,611 = 61,1\%$ . Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan manajemen berbasis sekolah berpengaruh terhadap mutu sekolah dapat diterima. Pengaruh komite sekolah

(X2) terhadap mutu sekolah (Y) secara langsung sebesar  $0,389 = 38,9\%$ . Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan komite sekolah berpengaruh terhadap mutu sekolah dapat diterima. Pengaruh manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah terhadap mutu sekolah secara bersama-sama sebesar  $0,772 = 77,2\%$ . Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap mutu sekolah dapat diterima.

Saran-saran yang disampaikan sehubungan dengan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan pada hasil penelitian maka peneliti menyarankan untuk memperhatikan pengaruh manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah terhadap mutu sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang beserta jajaran yang terkait lainnya terutama dalam hal peningkatan mutu sekolah disarankan memberikan perhatian khusus dalam hal ini : 1) melakukan pembinaan terhadap kemampuan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 2) memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya, 3) membuka kesempatan pada kepala sekolah dan guru untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah hendaknya terus dikembangkan melalui pelatihan dan penataran yang efektif sehingga akan menjadi faktor pendorong yang positif bagi peningkatan mutu sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2003. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Anonimus. 2006. *Panduan Penilaian Kinerja Sekolah Dasar*. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Jakarta.
- Arcaro, Jerome S.2007. *Pendidikan Berbasis Mutu. Prinsip - prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Danim Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- ..... 2002. *Konsep dan Teori Manajemen Berbasis Sekolah*. Bengkulu: Proyek Peningkatan Penelitian Dikti, Ditjen Dikti.
- Depdiknas. 2000. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu SLTP. Direktorat PLP.
- 2002. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Eka Jaya.
- 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu SLTP, Direktorat PLP.
- ..... 2003. *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta: Eka Jaya.
- ..... 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat PLP.
- ..... 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sekolah Menengah Pertama (SMP)*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- ..... 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.
- Fattah Nanang. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Pemberdayaan olah Sekolah dalam rangka Peningkatan*

*Mutu dan Kemandirian* . Bandung  
Andira.

Hatton and D. Smith. 1992. *Perspective on Effective Schools*. Sidney: Allen & Unwin Pty Ltd.

Manullang, Belferik. 2001. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), (Makalah), Disampaikan pada Seminar Sehari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lubuk Pakam, di Lubuk Pakam, tanggal 29 Maret 2001.

Moedjiarto. 2002. Karakteristik Sekolah Unggul, Metodologi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jakarta: Duta Graha Pustaka.

Mulyasa, E. 2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurkholis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta: Grasindo.

Sagala, S. 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

..... 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Nimas Multima.

Slamet. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah, (Makalah), Dipresentasikan Pada Workshop Sekolah Standar Nasional, tanggal 18-21 Oktober 2005, di LPMP Jakarta.

Soemantrie, Hermana. 2004. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang.